

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada penelitian *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang, sehingga sapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis *Dynamic Governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang

A. *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan)

Penerapan elemen *thinking ahead* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan BPBD Kota Semarang menerapkan kemampuan *exploring and anticipating* dengan sangat baik. BPBD Kota Semarang telah mengadopsi pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam mengantisipasi tren bencana yang akan terjadi di masa depan salah satunya dengan melakukan kegiatan berupa forum dan kajian pra-bencana, seperti kegiatan Renkon dan melakukan analisis SWOT. Kegiatan tersebut merupakan bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang. Namun sayangnya program dan juga kebijakan yang di laksanakan tidak dibarengi dengan indikator yang berfungsi untuk menilai keberhasilan dari program tersebut, sehingga kemampuan *perceiving and testing* belum optimal. Selain itu, kemampuan

strategizing yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang juga masih belum optimal. Hal tersebut karena inovasi digital yang digunakan oleh BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Namun demikian, untuk mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi. BPBD Kota Semarang juga melakukan strategi yang bersumber dari hasil analisis tantangan dan juga hambatan, seperti pemasangan EWS di daerah rawan bencana dan pelibatan *stakeholder* lain dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pelibatan *stakeholders* lain dalam penanggulangan bencana diharapkan program maupun kebijakan penanggulangan bencana dapat berkelanjutan.

B. *Thinking Again* (Berpikir Kembali)

Elemen *thinking again* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang dirancang dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Pada pola pikir ini masyarakat diharapkan bisa memberikan urun gagasan terhadap sistem penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang. Masyarakat juga bisa memberikan masukan baik kritik dan saran dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang. Selain itu, keberadaan indikator kinerja memungkinkan BPBD Kota Semarang meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas intervensi kebijakan di lapangan. Proses perumusan kebijakan tidak hanya didasarkan pada data

statistik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan aktual masyarakat, sehingga menghasilkan desain kebijakan yang lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan. Namun demikian, kemampuan *implementing* masih belum berjalan optimal. Salah satu faktor penghambat utamanya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan keterlibatan publik dalam kebijakan penanggulangan bencana hidrometeorologi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan penguatan strategi pemberdayaan masyarakat agar peran kolektif dalam sistem penanggulangan bencana dapat terwujud secara lebih efektif dan berkesinambungan.

C. *Thinking Across (Berpikir Lintas Batas)*

BPBD Kota Semarang telah menerapkan elemen *thinking across* dengan baik. Upaya sistematis yang dilakukan BPBD dalam menelusuri, mempelajari, dan membandingkan praktik penanggulangan bencana, baik melalui literatur maupun studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki pengalaman serupa. Pendekatan tersebut menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika yang tinggi. Selain melakukan studi komparasi, dalam proses perumusan kebijakan, program dan juga strategi.

BPBD Kota Semarang juga melakukan proses evaluasi dan refleksi

dalam rangka untuk memperbaiki kebijakan yang ada sebelumnya dan akan mengoptimalkan kebijakan tersebut di periode selanjutnya. Adanya praktik tersebut tentu akan membawa BPBD Kota Semarang bisa menghasilkan program dan juga kebijakan yang bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masa yang akan datang. Proses tersebut tentu bisa memastikan bahwa, kebijakan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat

2. Faktor pendorong dan penghambat *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

A. Komitmen

Pemerintah Kota Semarang menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi, yang tercermin melalui kebijakan, program, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut berperan sebagai fondasi strategis dalam memastikan efektivitas implementasi mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan pascabencana. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh partisipasi masyarakat. Tingkat keterlibatan publik dalam berbagai program kebencanaan masih fluktuatif dan cenderung terbatas. Ketidakeimbangan ini menandakan bahwa keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Semarang tidak hanya

bergantung pada kapasitas institusi pemerintah, tetapi juga pada internalisasi komitmen kolektif, kesadaran risiko, dan kesediaan masyarakat untuk berperan aktif sebagai bagian integral dari sistem ketangguhan bencana daerah.

B. Pragmatisme

BPBD Kota Semarang telah berhasil menginternalisasi pola pikir pragmatis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Orientasi pragmatis tersebut tercermin melalui responsivitas organisasi dalam mengambil keputusan secara cepat, fleksibel, dan berorientasi hasil ketika bencana terjadi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kesesuaian prosedural, tetapi juga mengakui urgensi situasional yang menuntut tindakan adaptif berdasarkan konteks lapangan.. Implementasi pola pikir ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Semarang tidak semata-mata berpegang pada regulasi secara kaku, tetapi mampu mengelola dinamika kebencanaan melalui kombinasi antara pengalaman empiris, pertimbangan teknis, dan prioritas kemanusiaan sebagai prinsip utama.

C. Sumber Daya

Kota Semarang telah memiliki sumber daya fisik yang relatif memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, yang tercermin melalui ketersediaan logistik, infrastruktur pendukung, serta sarana operasional yang diperlukan dalam respon darurat. Meskipun demikian, efektivitas penyelenggaraan penanggulangan

bencana masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya pada aspek sumber daya manusia yang belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknis. Kondisi tersebut menyebabkan BPBD Kota Semarang masih harus mengandalkan dukungan relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi program mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana. Dengan demikian, meskipun secara fisik Kota Semarang telah memiliki fondasi yang cukup kuat, keberlanjutan penanggulangan bencana hidrometeorologi masih memerlukan penguatan sumber daya manusia dan dukungan pendanaan yang lebih proporsional agar upaya penanggulangan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan temuan penelitian analisis *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi Kota Semarang sebagai berikut:

1. *Thinking Ahead* (Berpikir Kedepan)

- A. Memperkuat kemampuan *perceiving and testing* dan kemampuan *strategizing*, BPBD Kota Semarang perlu menyusun Indikator Kinerja Program / Kebijakan (IKP) yang tidak hanya mengukur *output* (jumlah kegiatan), tetapi juga berbasis pada *outcome*

(dampak yang dihasilkan). Seperti contoh, membuat persentase masyarakat KSB dan KATANA yang mampu melakukan evakuasi mandiri.

- B. Mengoptimalkan aplikasi SEMARISK, perlu perbaikan dari sisi teknis, seperti dari aspek aksesibilitas, tampilan dan stabilitas sistem. Selain itu melakukan uji coba secara bertahap dan melakukan pengenalan dan edukasi kepada berbagai pihak.

2. *Thinking Again* (Berpikir Kembali)

- A. Memperkuat kemampuan *implementing*, BPBD Kota Semarang perlu melakukan monitoring dan juga evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan terhadap program-program dan kebijakan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.
- B. Melakukan pendekatan *community-based disaster risk management (CBDRM)* perlu diperluas dan diperkuat dengan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi yang ada di Kota Semarang. Dapat dilakukan dengan cara pelatihan berbasis praktik langsung, tidak hanya sosialisasi satu arah

3. *Thinking Across* (Berpikir Lintas Batas)

- A. Elemen *thinking across* yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang sudah baik. BPBD Kota Semarang perlu melakukan pengoptimalan

indikator kinerja, penggunaan data sebagai dasar keputusan, kolaborasi multipihak, digitalisasi, dan tindak lanjut yang jelas, BPBD Kota Semarang akan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

4. Faktor Pendorong dan Penghambat *Dynamic Governance*

- A. Mengombinasikan pendekatan edukatif, teknologi, insentif sosial, dan kemitraan strategis berbasis komunitas, Kota Semarang dapat mewujudkan sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi yang tidak hanya responsif tetapi juga *resilient* dan berkelanjutan melalui komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- B. Optimalisasi penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang memerlukan transformasi dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada respons menuju tata kelola yang berbasis peningkatan kapasitas, efisiensi pendanaan, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan kolaboratif. Apabila strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kapasitas BPBD dan sistem penanggulangan bencana dapat menjadi lebih adaptif, tangguh, serta responsif terhadap dinamika risiko di masa depan.